

PEKANBARU, RIAUPLUS.COM – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, hingga kini belum memberikan sanksi terhadap oknum PNS BKD Riau, yang diduga terlibat pungutan liar (Pungli) Rp200 ribu, saat penyerahan 453 SK PNS Pemprov Riau. Pasalnya, BKD masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Inspektorat Riau.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Said Saqlul Amri, ketika dikonfirmasi wartawan tentang perkembangan kasus tersebut. Menurut Saqlul, pihaknya telah menyerahkan seluruh penyelidikan kasus ini ke Inspektorat.

"Kita sudah laporkan hal ini kepada Inspektorat. Jadi biarlah Inspektorat yang menelitinya. Saat ini, kita masih menunggu hasil laporan tersebut dari inspektorat," terang Saqlul, Senin (25/4) usai mengikuti Peringatan HUT Linmas dan Otonomi Daerah Riau di halaman Kantor Gubernur Riau.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Riau, Syamsurizal menyatakan, pihaknya akan memanggil Kepala BKD Riau, untuk mempertanyakan pungli yang dilakukan bawahannya itu. Pihaknya akan menelesuri dan menyelidiki terjadinya Pungli tersebut. Dari penyelidikan itu, Inspektorat akan mengetahui, pelanggaran yang dilakukan oknum BKD Riau itu.

"Kita akan telusuri siapa yang mengintruksikan, siapa yang menetapkan nilai uang yang diminta. Darimana aturannya, hingga mereka meminta uang dan hal-hal lainnya yang menyangkut kasus pungli saat penyerahan SK tersebut," bebernya ketika itu. **M. Nur Zein**